

DISERTASI

KETAHANAN PANGAN PADA WILAYAH PEDESAAN
DAN PERKOTAAN HUBUNGANNYA DENGAN
KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT

(Studi Kasus di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka
Kabupaten Bone)

*FOOD SECURITY AT RURAL AND URBAN AREAS, ITS
RELATIONSHIP WITH THE CONSUMPTION OF
COMMUNITY*

*(A Case Study at Pammusureng Village and Bukaka
Sub-district, Bone Regency)*

ABDUL HALIK
P 0100303001



PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANAUDIN
MAKASSAR
2008

DISERTASI

KETAHANAN PANGAN PADA WLAYAH PEDESAAN
DAN PERKOTAAN HUBUNGANNYA DENGAN
KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT

(Studi Kasus di Desa Pammusureng dan
Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone)

*Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor
Dalam bidang ilmu Pertanian, Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin*

Oleh :

ABDUL HALIK
P 0100303001

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANAUDDIN
MAKASSAR
2008

DISERTASI

KETAHANAN PANGAN PADA WILAYAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN HUBUNGANNYA DENGAN KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT

(Studi Kasus di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka,
Kabupaten Bone)

Disusun dan diajukan oleh :

Abdul Halik
Nomor Pokok : P0100303001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Disertasi
Pada Tanggal 25 Agustus 2008
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Tim Promotor,

Prof. Dr. Ir. H. Jalil Genisa, MS.
Promotor

Prof. Dr. Ir. Mursalim, M.Sc.
Ko-Promotor

Dr.Ir. Didi Rukmana, M.Sc.
Ko-Promotor

Ketua Program Studi S3
Ilmu – Ilmu Pertanian

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof.Ir.H.M.Saleh S.Ali,M.Sc.Ph.D.

Prof.Dr.dr. A. Razak Thaha, M.Sc.

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Abdul Halik

Nomor Mahasiswa : P 0100303001

Program Studi : Ilmu Ilmu Pertanian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari, terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Agustus 2008

Yang Menyatakan

Abdul Halik

ABSTRAK

Abdul Halik. Ketahanan Pangan Pada Wilayah Pedesaan dan Perkotaan Hubungannya Dengan Konsumsi Pangan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka, Kabupaten Bone). Dibimbing oleh **Jalil Genisa, Mursalim, dan Didi Rukmana.**

Penelitian ini bertujuan : 1) mengkaji tingkat ketahanan pangan masyarakat yang mencakup aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, 2) mengkaji hubungan antara tingkat ketahanan pangan wilayah dengan konsumsi pangan masyarakat dan 3) mengkaji bagaimana upaya masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan demi memperbaiki ketahanan pangannya.

Penelitian ini merupakan studi kasus. Lokasi penelitian terdiri Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani yang berada pada wilayah pedesaan dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang pada wilayah perkotaan. Penentuan sampel rumah tangga responden, dimulai dengan memilih rumah tangga yang memiliki anak balita, kemudian diambil sampel secara acak. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan penyebaran kuisioner kepada responden, data sekunder didapat dari data statistik desa atau kelurahan, data statistik Kecamatan Dalam Angka, dan Kabupaten Bone Dalam Angka, serta data dari berbagai instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, 25 % rumah tangga di Desa Pammusureng dan 26 % rumah tangga di Kelurahan Bukaka yang masuk kategori tidak tahan pangan, akan tetapi Secara umum tingkat ketahanan pangan di kedua lokasi tersebut sama, dengan kategori sangat tahan pangan. *Kedua*, ketahanan pangan wilayah ada hubungannya dengan konsumsi pangan masyarakat, namun jika dilihat lebih jauh dari ketiga aspek ketahanan pangan, maka aspek ketersediaan pangan tidak menentukan tingkat konsumsi pangan, yang lebih berperan adalah daya beli masyarakat yang merupakan akumulasi dari tingkat pendapatan, kesempatan kerja dan pendidikan kepala rumah tangga, serta ditunjang oleh peranan kemampuan ibu rumah tangga dalam mengatur dan mengelola konsumsi rumah tangganya. Ketiga, masyarakat di Desa Pammusureng sebagian besar berusaha sambilan pada sektor yang berkaitan dengan pertanian, sedangkan di Kelurahan Bukaka berusaha pada bidang di luar pertanian.

Kata Kunci : Ketahanan Pangan Wilayah, Konsumsi Pangan Masyarakat

ABSTRACT

Abdul Halik. Food Security at rural and urban areas ,Its Relationship with the Consumption of Community (A Case Study at Pammusureng Village and Bukaka Sub-district, Bone Regency), supervised by Jalil Genisa, Mursalim, and Didi Rukmana

The aim of the study was (1) to analyze the level of food security covering the aspect of food availability, food accessibility, and food consumption in Pammusureng village and Bukaka Village, Bone regency. (2) to analyze the relationship between the food security and the food consumption of community in Pammusureng village and Bukaka Village, Bone regency, (3) to analyze how the community efforts in Pammusureng village and Bukaka Village, Bone regency in the efforts to increase the income to recover their food defense.

This research was the case study where the research location consisting of two locations i.e. Pammusureng village Bonto Cani District existing in the village area , while Bukaka village, Tanete Riattang existing in the city area. The determination of household sample started from selecting the household possessing the infant, the sample selected randomly. The collection of primary data conducted by using the method of interview and questionnaire distribution to responden. The secondary data obtained from village and district statistic data , and Bone Regency in Figures and data from the related departments.

The results showed that 1) the level of village community food availability in Bone regency was higher if compared with Bukaka Village city community, although both locations were still in food surplus. While food access and food consumption in Bukaka village existing in the better food security level if compared with Pammusureng village. Generally the food security level of two villages existing in the same level. 2) The results of correlation analysis between some indicators of food security with the community food consumption in Pammusureng village and Bukaka village showed that food production had the significant relationship with food consumption frequency, the poor index , work hours of household leader also had the significant relationship with the frequency of food consumption, energy and protein consumption, while the percentage of illiterate household wife had the significant relationship with number of energy consumption. 3) the community effort in improving the food defense of household where most of village community tried to get the part time job from agriculture activity while the city community found work out of agriculture sector.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan karuniah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu kenyataan bahwa Kabupaten Bone sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan namun masih ditemukan adanya gejala masyarakat yang mengalami ketidaktahanan pangan, baik itu pada masyarakat pedesaan maupun perkotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kondisi ketahanan pangan dan hubungannya dengan konsumsi pangan pada masyarakat pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bone, dimana ketahanan pangan dapat dilihat dari tiga aspek masing-masing ketersediaan pangan, akses masyarakat terhadap pangan dan pemanfaatan pangan, sedangkan konsumsi pangan diamati dari pola konsumsi energy dan protein, serta bahan pangan pokok yang dikonsumsi. Penelitian ini berlokasi di salah satu desa pada wilayah pedesaan dan kelurahan pada wilayah perkotaan. Hasil penelitian diharapkan akan menjadi salah satu informasi bagi pengambil kebijakan dalam rangka mengatasi masalah ketidaktahanan pangan di daerah tersebut.

Dalam menyelesaikan disertasi ini, penulis banyak menjumpai tantangan dan hambatan, sehingga membutuhkan kesabaran, ketabahan dan kerja keras. Berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, oleh karena itu, tak lupa kami

sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Prof.Dr.Ir.H.Jalil Genisa,MS. selaku Promotor, Prof.Dr.Ir. Mursalim,M.Sc dan Dr.Ir. Didi Rukmana,M.Sc. masing-masing selaku Ko-Promotor yang sejak awal proses penelitian telah banyak memberikan semangat dorongan dan bimbingan kepada penulis.

Ucapan terimakasih yang tulus pula penulis sampaikan kepada tim penguji, masing-masing: Prof.Dr. Ir. Hj. Farida Nurland, MS., Prof.Dr.Ir. H.M. Syawal, M.Sc., Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS., Dr. Ir. Akhsan Djalaluddin, MS., dan Ir. Hasnawati Habibie, M.App.Sc. Ph.D selaku penguji eksternal yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. dr. H. Razak Thaha selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dan Prof. Dr.Ir.H.M.Saleh S.Ali,M.Sc. sebagai Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Pertanian, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang banyak membantu memberi kemudahan dalam proses penyelesaian studi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah daerah Kabupaten Bone, Camat Bonto Cani, Camat Tanete Riattang, Kepala Desa Pammusureng, dan Kepala Kelurahan Bukaka, masing-masing atas izin dan segala bantuannya dalam rangka pelaksanaan penelitian di wilayah tersebut. Demikian pula kepada teman-teman mahasiswa

Program S3 Pascasarjana angkatan 2003, yang senantiasa mendorong dan memberikan semangat kepada penulis.

Terima kasih yang tak terhingga pula kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Ali Achmad (Alm.) dan Hadera yang dengan penuh kasih sayang dalam mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis sehingga dapat mencapai taraf pendidikan tertinggi. Demikian pula kepada saudara-saudaraku, keluarga dan handai taulan atas segala dorongan dan doanya. Karya berupa disertasi ini, tak lupa kupersembahkan sebagai wujud kasih sayang penulis kepada istri tercinta Jannati T.,SE. M.Si. dan anakda tersayang Rezky Auliah atas pengertian, kesabaran, serta bantuan semangat, tenaga serta doa yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Akhirnya penulis berharap agar disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat khususnya di Kabupaten Bone, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis menyampaikan terima kasih atas segala kritik dan saran dari semua pihak, sehingga dapat membantu untuk lebih menyempurnakan disertasi ini, semoga segala bantuannya mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu Wataala, Amin.

Makassar, Februari 2008

Abdul Halik

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	ii
ABSTRAK	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Konsep Ketahanan Pangan	14
B. Ketahanan Pangan Masyarakat	22
C. Karakteristik Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan	27
D. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat	33
E. Konsumsi Pangan Masyarakat	37
F. Penelitian Sejenis Sebelumnya	42
G. Kerangka Pikir Penelitian	45

H. Hipotesis Penelitian	49
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Tempat dan Waktu Penelitian	50
B. Populasi dan Sampel	51
C. Metode Pengumpulan Data	53
D. Variabel Penelitian	53
E. Analisis Data	64
F. Definisi Operasional	67
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	72
A. Tinjauan Umum Daerah Penelitian	72
1. Batas Administrasi dan Kondisi Geografis	72
2. Kependudukan dan Pertanian	75
3. Kecamatan Bonto Cani	79
4. Kecamatan Tanete Riattang	85
5. Karakteristik Masyarakat pad Lokasi Penelitian	91
B. Ketahanan Pangan Wilayah	98
1. Ketersediaan Pangan	98
2. Akses Pangan Wilayah	106
3. Pemanfaatan Pangan	122
4. Ketahanan Pangan Wilayah	140
C. Konsumsi Pangan Masyarakat dan Anak Balita	145
1. Makanan Pokok dan Pangan Sehari-hari	145
2. Frekwensi Makan Rumah Tangga dan Balita	149

3. Konsumsi Energi dan Protein Rumah Tangga	156
4. Tingkat Konsumsi Pangan Masyarakat dan Anak Balita	166
D. Hubungan Antara Ketahanan Pangan Dengan Konsumsi Pangan Masyarakat	172
E. Upaya Masyarakat Meningkatkan Ketahanan Pangan	181
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	186
A. Kesimpulan	186
B. Saran	188
DAFTAR PUSTAKA	189
LAMPIRAN-LAMPIRAN	194

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone, Tahun 2006	78
2.	Luas Wilayah , Jarak Dari Ibukota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten untuk Setiap Desa dalam Kecamatan Bonto Cani.	80
3.	Jumlah Penduduk Dirinci Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Desa atau Kelurahan dalam Kecamatan Bonto Cani , Tahun 2006.	81
4.	Jumlah Rumah Tangga pada Setiap Desa di Kecamatan Bonto Cani, pada Tahun 2006	82
5.	Luas Lahan Pertanian serta Pemanfaaannya pada Tiap Desa dan Kelurahan di Kecamatan Bonto Cani, 2006.	83
6.	Luas Wilayah, Jarak Dari Ibukota Kecamatan dan Kabupaten Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang pada Tahun 2006.	86
7.	Jumlah Penduduk Dirinci Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang, 2006.	87
8.	Jumlah Rumah Tangga pada Setiap Kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang, pada Tahun 2006.	88
9.	Luas Lahan Pertanian serta Pemanfaaannya pada Setia Kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang, 2006.	89
10.	Komposisi Kelompok Umur Masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2006.	92
11	Jumlah Anggota Rumah Tangga di Desa Pammusureng Keamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2006.	94
12.	Data Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2006.	95

No.	Teks	Halaman
13.	Jumlah Anak Balita dan Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Balita di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka, Tahun 2006.	97
14.	Luas Lahan Sawah, Lahan Kering , Produksi Padi, Jagung, Dan Umbi-umbian, Serta Produktifitas Lahan di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka, Tahun 2006.	99
15.	Produksi Netto Pangan Biji-bijian Masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang, Tahun 2006.	101
16.	Ketersediaan Pangan Biji-bijian Serta Indeks Ketersediaan Pangan Bagi Masyarakat di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka, Tanete Riattang.	103
17.	Prosentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Berdasarkan Pendapatan Perkapita Perbulan di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani, dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.	109
18.	Jumlah Jam Kerja Kepala Rumah Tangga Dalam Seminggu Di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka, Kab. Bone.	112
19.	Prosentase Kepala Rumah Tangga Yang Tidak Tamat Pendidikan Dasar di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.	115
20.	Prosentase Rumah Tangga Yang Tidak Dapat Mengakses Listrik di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.	118
21.	Indeks Gabungan Akses Masyarakat Terhadap Pangan di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.	120
22.	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Tinggal Lebih Dari 5 (lima) Kilometer dari Fasilitas Kesehatan di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka.	124
23.	Indeks Populasi Perdokter (I_{Doc}) di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.	126

No.	Teks	Halaman
24.	Persentase Jumlah Anak Yang Tidak diimmunisasi Lengkap Di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone.	128
25.	Persentase Rumah Tangga Yang Tidak Dapat Mengakses Air Bersih di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani Dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.	130
26.	Indeks Fasilitas Kesehatan (I_{HI}) pada Masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.	131
27.	Indeks Persentase Anak Dengan Berat Badan Kurang di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka, Bone.	134
28.	Indeks Gabungan Outcome Nutrisi dan Kesehatan di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.	135
29.	Indeks Perempuan Buta Huruf (I_{FI}) di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.	137
30.	Indeks Gabungan Pemanfaatan Pangan (I_{FU}) Masyarakat Di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete riattang.	139
31.	Ketahanan Pangan Masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.	140
32.	Bahan Pangan Pokok Masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.	147
33.	Kelompok Pangan Untuk Konsumsi Masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.	149
34.	Frekwensi Memasak Makanan Untuk Konsumsi Setiap Masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto cani Dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.	150

No.	Teks	Halaman
35.	Frekwensi Makan Anggota Rumah Tangga Masyarakat Di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka .	152
36.	Frekwensi Makan Anak Baita di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.	155
37.	Konsumsi Energi, Kecukupan Energi, Tingkat Konsumsi Energi (TKE) Rumah Tangga di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka T. Riattang.	157
38.	Pola Konsumsi Energi Anak Balita pada Rumah Tangga Di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang, Bone.	159
39.	Konsumsi Protein, Kecukupan Protein , Tingkat Konsumsi Protein (TKP) Rumah Tangga di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.	162
40.	Pola Konsumsi Pangan Sumber Protein Bagi Anak Balita Di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang, Bone.	164
41.	Kategori Status Gizi Masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.	167
42.	Status Gizi Anak Balita di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.	171
43	Hasl Analisis Chi Squarei Beberapa Indikator Ketahanan Pangan dengan Konsumsi Pangan Masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone.	173
44	Hasl Analisis Chi Squarei Beberapa Indikator Ketahanan Pangan dengan Konsumsi Pangan Masyarakat di Kel. Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.	173
44.	45 Persentase Rumah Tangga Yang Berusaha pada Berbagai Bidang Pekerjaan untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangganya di D esa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone	183

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pikir Penelitian Mengenai Ketahanan Pangan Dan Konsumsi Pangan Masyarakat.	48
2.	Histogram Ketersediaan Pangan di Desa Pammusureng Dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.	105
3.	Histogram Indeks Gabungan Akses Pangan Masyarakat Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka, Kab. Bone.	121
4.	Histogram Indeks Gabungan Pemanfaatan Pangan Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.	139
5.	Histogram Indeks Tingkat Ketahanan Pangan di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.	143
6.	Histogram Frekwensi Makan Masyarakat di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone	153
7.	Histogram Jumlah Konsumsi Energi Masyarakat di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.	158
8.	Histogram Jumlah Konsumsi Protein Masyarakat di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.	163
9.	Histogram Tingkat Konsumsi Energi Masyarakat di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.	168
10.	Histogram Tingkat Konsumsi Energi Masyarakat di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone	169
11.	Histogram Tingkat Konsumsi Pangan Anak Balita di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.	170

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Berdasarkan Data Tahun 2005.	195
2.	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Untuk Setiap Kecamatan.	196
3.	Penduduk Kabupaten Bone Yang Dirinci Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin.	197
4.	Penduduk Kabupaten Bone Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada Tahun 2005.	198
5.	Tingkat Pendapatan Perkapita Masyarakat Berdasarkan Data Tingkat Pendapatan Perkapita Rumah Tangga di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani & Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.	199
6.	Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Pada Masyarakat Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani & Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.	200
7.	Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Masyarakat Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani & Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.	201
8.	Data Mengenai Jumlah Rumah Tangga Yang Punya Anak Balita, Jumlah Anak Balita, Baik Yang diimmunisasi dan Yang Belun di immunisasi di kedua Lokasi Penelitian.	202
9.	Sumber Air Bersih Bagi Rumah Tangga pada Masyarakat Di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani & Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.	203
10.	Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi, Jumlah Anak Balita Dengan Berat Badan Kurang di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka T. Riattang.	204
11.	Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Baca tulis Ibu Rumah Tangga di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.	205

No.	Teks	Halaman
12.	Jenis Bahan Makanan Pokok Bagi Rumah Tangga Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang	206
13.	Frekwensi Memasak Makanan untuk konsumsi Setiap Hari Untuk Rumah Tangga di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kec. Tanete Riattang.	207
14.	Frekwensi Makan Anggota Rumah Tangga Selain Balita Pada Masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang	208
15.	Frekwensi Makan Anak Balita pada Rumah Tangga di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.	209
16.	Kandungan Gizi Konsumsi Pangan Perkapita Perhari pada Rumah Tangga di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone.	210
17.	Kandungan Gizi Konsumsi Pangan Perkapita Perhari pada Rumah Tangga di Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.	211
18.	Pola Konsumsi Pangan Berupa Sumber Energi, Sumber Protein dan Susu Tambahan Bagi Anak Balita pada Rumah Tangga di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani.	212
19.	Pola Konsumsi Pangan Berupa Sumber Energi, Sumber Protein dan Susu Tambahan Bagi Anak Balita pada Rumah Tangga di Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.	213
20.	Pekerjaan Pokok dan Pekerjaan Tambahan Kepala Rumah Tangga Responden pada Masyarakat Desa Pammusureng Kecamatan bonto Cani, Kabupaten Bone.	214
21.	Pekerjaan Pokok dan Pekerjaan Tambahan Kepala Rumah Tangga Responden pada Masyarakat di Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.	215

No.	Teks	Halaman
22.	Analisis Statistik Chi Square dengan uji Kontingensi Dua Arah Antara Angka Kemiskinan Dengan Konsumsi Pangan Masyarakat Desa pammusuren Dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.	215
23.	Analisis Statistik Chi Square dengan uji Kontingensi Dua Arah Antara Jumlah Jam Kerja Dengan Konsumsi Pangan Masyarakat Desa pammusuren Dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.	217
24.	Analisis Statistik Chi Square dengan uji Kontingensi Dua Arah Antara Tingkat Pendidikan Dengan Konsumsi Pangan Masyarakat Desa pammusuren Dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.	219
25.	Analisis Statistik Chi Square dengan uji Kontingensi Dua Arah Antara Angka Buta Huruf Dengan Konsumsi Pangan Masyarakat Desa pammusuren Dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.	221

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, maka Indonesia memiliki persoalan tersendiri sehubungan dengan penyediaan bahan pangan masyarakatnya yang juga semakin lama semakin banyak. Bahan pangan pokok bagi suatu masyarakat dapat dikategorikan sebagai komoditas strategis karena merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu produk tersebut dikategorikan sebagai komoditas ekonomis, sosial politik dan bahkan pertahanan keamanan.

Mengingat pentingnya persoalan penyediaan bahan pangan bagi masyarakat, maka pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan dan program yang diarahkan kepada peningkatan produksi bahan pangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan produksi pangan khususnya beras, melalui pelaksanaan program intensifikasi, eksentifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi, dimana upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan tercapainya swasembada pangan, khususnya beras pada tahun 1984.

Melalui pelaksanaan berbagai program tersebut, produksi tanaman pangan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 1996. Namun demikian, setelah periode tersebut produksi perkapita berbagai jenis bahan pangan termasuk padi menurun drastis bahkan angka produksi

pangan perkapita pada tahun 2006 lebih rendah dari produksi 10 tahun sebelumnya yakni pada tahun 1996 (BPS, 2006). Hal tersebut terjadi karena disamping produktifitas lahan pertanian yang sudah semakin menurun akibat penggunaan lahan yang berlebihan dimasa yang lalu, juga dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian tanaman padi yang seolah-olah tidak berpihak kepada petani, misalnya dengan peniadaan subsidi pupuk, penentuan harga dasar gabah yang rendah, sehingga usaha tani padi semakin tidak menguntungkan bagi petani. Akibatnya minat para petani terhadap usaha tani padi semakin menurun, dan produksi padi juga semakin berkurang.

Pembangunan pertanian yang bertumpu pada pengembangan komoditas padi sebagai satu-satunya bahan pangan utama, memang telah berhasil mencapai swasembada pangan, namun dampak lain dari kebijakan tersebut adalah pola konsumsi pangan dari masyarakat juga berubah, dari pola konsumsi dengan sumber bahan pangan yang beragam (misalnya padi, jagung, ubi dan sagu) menjadi pola pangan tunggal dengan bahan utama beras. Di dalam masyarakat seolah-olah lahir suatu anggapan bahwa bagi mereka yang mengkonsumsi beras memiliki derajat sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi pangan dengan sumber lain seperti jagung, ubi dan sagu. Hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab kebutuhan akan bahan pangan beras menjadi semakin besar, sehingga akhir-akhir ini, produksi beras dalam negeri tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan

pangan masyarakat, yang mengharuskan pemerintah melakukan import beras dari berbagai negara. Kondisi tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan baik secara nasional, wilayah maupun rumah tangga.

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya bahan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Kantor Menteri Urusan Pangan, 1996). Atau dengan kata lain bahwa ketahanan pangan dari suatu wilayah atau masyarakat akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : produksi pangan, daya beli masyarakat dan pola konsumsi pangan dari masyarakat tersebut.

Konsep ketahanan pangan, kemudian berkembang menjadi dua konsep utama, yaitu konsep swasembada (*Self sufficiency*) yaitu suatu konsep yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestic melalui produksi dalam negeri. Konsep tersebut menganggap bahwa suatu Negara atau wilayah dikatakan memiliki ketahanan pangan yang kuat jika mampu memproduksi sendiri kebutuhan pangan masyarakatnya. Konsep ini sering dianggap sebagai suatu konsep yang autarki yang mengabaikan prinsip efisiensi dan keunggulan komparatif.

Konsep yang kedua adalah konsep ketahanan pangan dalam artian Economic Income, yang menganggap bahwa ketahanan pangan yang kuat tidaklah berarti bahwa seluruh kebutuhan pangan masyarakat harus diproduksi sendiri, yang terpenting adalah mereka memiliki

pendapatan yang cukup untuk membeli bahan pangan yang ada di pasar, baik lokal maupun internasional.

Sehubungan dengan berkembangnya pengertian ketahanan pangan tersebut di atas, maka kemudian dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 (Kantor Menteri Negara Urusan Pangan, 1996) mengatakan bahwa, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya bahan pangan bagi rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Dengan pengertian seperti itu, maka berbicara soal ketahanan pangan, pada dasarnya kita bicara soal berbagai hal yang dapat menyebabkan orang tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Berbagai hal yang dimaksud adalah tersedianya pangan, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat. Ketiga faktor tersebut akan sangat menentukan apakah suatu rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi setiap anggota keluarganya atau tidak.

Daerah pedesaan merupakan wilayah yang identik dengan pertanian, dimana hampir semua kebutuhan pangan pokok masyarakatnya dapat diproduksi sendiri, sehingga dalam kaitannya dengan konsep ketahanan pangan maka daerah pedesaan lebih mengarah pada konsep swasembada (*self sufficiency*). Meskipun demikian karena kondisi pertanian yang sangat sederhana, di daerah pedesaan masih banyak dijumpai masyarakat yang kekurangan bahan pangan dalam berbagai bentuk dan kasus yang berbeda.

Sementara itu, masyarakat perkotaan pada umumnya memenuhi kebutuhan pangannya bukan atas produksi sendiri, atau dengan kata lain kebutuhan tersebut dipenuhi dari apa yang tersedia di pasar. Sementara itu, lapangan kerja bagi masyarakat perkotaan lebih bervariasi, dan mengandalkan sektor industri dan jasa. Dalam banyak kasus, ketidaktahanan pangan tidak hanya dijumpai di daerah pedesaan, akan tetapi juga banyak terjadi di daerah perkotaan. Dalam kaitan dengan konsep ketahanan pangan, maka daerah perkotaan lebih mengarah pada konsep economic income, yang menganggap bahwa ketahanan pangan yang baik tidak harus kebutuhan pangannya diproduksi sendiri, yang penting adalah mereka memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli bahan pangan yang ada di pasar.

Kabupaten Bone adalah merupakan salah satu daerah lumbung pangan yang cukup potensial di Sulawesi Selatan, khususnya untuk produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2005, bahwa pada daerah tersebut terdapat lahan sawah baik yang beririgasi semi teknis maupun beririgasi teknis seluas 130.399 ha dengan produksi padi sebesar 538,857 ton/tahun. Selain produksi padi, di daerah tersebut juga terdapat produksi bahan pangan lain seperti jagung, ubi kayu, maupun berbagai produk pertanian lainnya dengan luas panen 51.640 ha dengan total produksi 109.787 ton, karena ditunjang oleh lahan yang masih cukup luas dan belum dimanfaatkan. Dari potensi tersebut, kabupaten bone tidak hanya

mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya yang berjumlah 654.312 jiwa, akan tetapi juga dapat mensuplai kebutuhan bahan pangan daerah tetangga yang kekurangan bahan pangan, baik di Sulawesi Selatan maupun kawasan timur Indonesia lainnya.

Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa masyarakat Kabupaten Bone, terbebas dari kekurangan bahan pangan dan gizi. Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat 15,66 % penduduk masih tergolong miskin, sehingga potensial untuk mengalami kekurangan bahan pangan dan gizi, utamanya anak-anak yang lebih sering disebut sebagai penyakit busung lapar. Gejala tersebut bukan hanya terjadi di daerah pedesaan, akan tetapi juga di daerah perkotaan (BPS, 2005)..

Dari hasil wawancara dengan pihak terkait diperoleh data yang menunjukkan bahwa selama tahun 2006, terdapat 8 kasus penyakit anak di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bone, yang dicurigai sebagai dampak dari kekurangan gizi, namun belum sampai pada kondisi penyakit busung lapar, seperti yang banyak dijumpai pada daerah yang mengalami kekurangan bahan pangan. Namun demikian, data tersebut menunjukkan bahwa persoalan gizi dan pangan masyarakat, khususnya anak-anak sudah mulai terjadi di daerah tersebut, walaupun kondisi ketersediaan bahan pangan secara umum mencukupi.

Pada akhir tahun 2007 yang lalu masyarakat Kabupaten Bone dikejutkan oleh adanya pemberitaan baik di media televisi maupun koran bahwa di daerah tersebut ditemukan adanya dua orang anak balita yang

meninggal dunia akibat penyakit busung lapar. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa persoalan ketidaktahanan pangan masyarakat di daerah Kabupaten Bone yang merupakan salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan sudah semakin memprihatinkan.

Salah satu faktor penting yang akan menentukan tingkat ketahanan pangan baik pada tingkat wilayah atau daerah, maupun pada tingkat rumah tangga adalah ketersediaan bahan pangan. Pada daerah pedesaan di kabupaten bone, dimana bahan pangan diperoleh dari hasil produksi sendiri, maka tingkat ketersediaan pangan lebih ditentukan oleh produksi pangan khususnya beras yang ada di daerah tersebut.

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Bone adalah tingginya perhatian pemerintah dalam mengembangkan sektor tersebut, yang dikenal dengan Tri Konsepsi Pembangunan Pertanian, yang meliputi pewilayahan komoditas, petik olah jual dan perubahan pola pikir. Dengan kebijakan tersebut, maka pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sektor pertanian baik dalam sektor produksi maupun pemanfaatan hasil pertanian semakin meningkat. Dampak lain dari kebijakan tersebut adalah peningkatan dalam hal infra struktur pertanian, yang dapat meningkatkan produksi secara umum.

Produksi bahan pangan akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain : luas lahan yang dimiliki oleh petani, system pengairan atau irigasi yang ada, tenaga kerja yang dalam hal ini petani sebagai pelaksana

usaha tani, dan juga bagaimana petani menangani pascapanen padi tersebut. Beberapa kegiatan pasca panen yang biasa dilakukan oleh petani padi, seperti alat perontok yang digunakan, sistem Penyimpanan di tingkat petani, pengeringan gabah, sampai pada tahap di mana beras tersebut siap untuk dikonsumsi atau dijual. Dalam kegiatan pasca panen tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kehilangan (*losses*) yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan secara keseluruhan.

Selain masalah ketersediaan bahan pangan, maka faktor lain yang akan menentukan tingkat ketahanan pangan suatu daerah atau rumah tangga adalah akses masyarakat terhadap bahan pangan, dimana akses tersebut akan sangat ditentukan oleh distribusi bahan pangan yang merata ke seluruh wilayah tersebut, dan tingkat pendapatan masyarakat, sehingga mereka dapat menjangkau atau membeli bahan pangan yang dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memproduksi bahan pangan yang dibutuhkan seperti yang banyak terjadi pada daerah perkotaan.

Faktor lain yang tak kalah pentingnya juga akan mempengaruhi ketahanan pangan suatu daerah atau masyarakat adalah bagaimana masyarakat memanfaatkan bahan pangan yang dimilikinya. Meskipun bahan pangan yang cukup telah mereka miliki, akan tetapi jika tingkat konsumsi pangannya utamanya anak-anak balita tidak mencukupi sesuai dengan standard yang dibutuhkan, maka tentu saja gejala gejala

kekurangan pangan atau kekurangan gizi akan terjadi. Kekurangan pangan dan gizi bias terjadi karena bahan pangan yang dikonsumsi tidak mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Berbeda dengan daerah pedesaan, maka pada daerah perkotaan dimana bahan pangan tidak diproduksi sendiri, maka ketahanan pangan selain ditentukan oleh ketersediaan pangan juga lebih tergantung pada penghasilan dari masyarakat. Ketersediaan bahan pangan akan lebih tergantung pada pasar yang biasa berasal dari produksi daerah pedesaan, tetapi juga ada kemungkinan merupakan beras dari daerah lain bahkan beras import. Jadi yang akan lebih berperan adalah bagaimana system distribusi dan harga dari beras tersebut sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan bahan pangan dari masyarakat atau tingkat konsumsi bahan pangan dari masyarakat, dimana hal ini akan sangat tergantung pada kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi anggota keluarganya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pendapatan atau penghasilan masyarakat perkotaan akan lebih ditentukan oleh bagaimana pekerjaan utama mereka, pekerjaan tambahan, sehingga akan lebih tergantung pada tingkat pendidikan, keterampilan yang mereka miliki dan ketersediaan lapangan kerja yang ada di Kabupaten Bone.

Kenyataan yang terjadi seperti disebutkan di atas menyebabkan peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana kondisi tingkat

ketahanan pangan kaitannya dengan konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Bone, dengan mengambil lokasi di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani yang berada pada wilayah pedesaan dan di Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riatang pada wilayah perkotaan. ,Dalam penelitian tersebut akan dianalisis mengenai tingkat ketersediaan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, pemanfaatan pangan yang merupakan komponen dari ketahanan pangan, dikaitkan dengan konsumsi pangan masyarakat. Di samping itu peneliti juga akan mengkaji strategi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan demi memperbaiki tingkat ketahanan pangan keluarganya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum adanya gambaran yang jelas mengenai bagaimana tingkat ketahanan pangan wilayah, yang didasarkan pada tiga aspek yaitu ketersediaan pangan yang merupakan gambaran dari tingkat produksi pangan di daerah tersebut, akses pangan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, dan pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan konsumsi pangan dan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi masyarakat, baik itu terjadi di Desa Pammusureng yang berada pada wilayah pedesaan maupun di Kelurahan Bukaka yang terletak pada wilayah perkotaan Kabupaten Bone.

Berdasarkan masalah utama tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat ketahanan pangan wilayah yang meliputi tiga aspeknya yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, di Desa Pammusureng yang berada pada wilayah pedesaan dan Kelurahan Bukaka pada wilayah perkotaan Kabupaten Bone.
2. Bagaimana hubungan antara ketahanan pangan wilayah dengan konsumsi pangan masyarakat di Desa pammusureng dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.
3. Bagaimana upaya masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani dan di Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dalam rangka meningkatkan pendapatan demi memperbaiki ketahanan pangannya

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat ketahanan pangan wilayah dan kaitannya dengan konsumsi pangan masyarakat, baik di Desa Pammusureng maupun di Kelurahan Bukaka, Kabupaten Bone.

Tujuan utama tersebut, dapat diuraikan menjadi beberapa tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji tingkat ketahanan pangan wilayah yang mencakup aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.
2. Untuk mengkaji hubungan antara tingkat ketahanan pangan wilayah dengan konsumsi pangan masyarakat di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka, Kabupaten Bone.
3. Untuk mengkaji bagaimana upaya masyarakat di Desa Pammusureng dan Kelurahan Bukaka dalam rangka meningkatkan pendapatan demi memperbaiki ketahanan pangannya.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam hal penerapan di masyarakat dan pengambil kebijakan.

- a. dari segi pengembangan ilmu pengetahuan , hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang ketahanan pangan dan status gizi dengan pendekatan sosial ekonomi di dalam masyarakat dengan karakteristik yang berbeda.
- b. Dalam penerapan di dalam masyarakat dan para pengambil kebijakan maka hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di dalam menangani masalah-masalah pangan dan gizi masyarakat yang timbul baik pada daerah perdesaan maupun perkotaan, khususnya di Kabupaten Bone.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan (*Food Security*) adalah istilah yang muncul sekitar tahun 1970-an ketika terjadi krisis ketersediaan sereal di pasar internasional. Sejak saat itu kajian tentang ketahanan pangan mulai ramai diperbincangkan dalam berbagai forum dan wacana. Setelah tahun 1980-an, dimana krisis pangan dunia mulai pulih, terjadi pergeseran konsep ketahanan pangan dari unit nasional ke unit yang lebih kecil seperti wilayah, daerah dan rumah tangga. Sehingga fokusnya bukan lagi pada persediaan pangan secara nasional dan wilayah, tetapi pada level rumah tangga dan individu untuk memenuhi kebutuhan gizi (Hardiansyah, et al. 1998)

Pergeseran konsep tersebut terjadi karena pada konsep yang lama tidak memperhatikan aspek distribusi dan akses masyarakat terhadap pangan. Konsep tersebut didasari oleh asumsi bahwa jika pasokan pangan tersedia, maka para pedagang akan menyalurkan pangan tersebut ke seluruh wilayah secara efisien. Selain itu, harga pangan akan tetap stabil pada tingkat yang wajar, sehingga dapat dijangkau oleh setiap keluarga .

Menurut Baliwati (2004), bahwa konsep ketahanan pangan yang telah diterima baik oleh para ilmuwan maupun praktisi bahwa setiap orang pada setiap saat memiliki aksesibilitas secara fisik dan ekonomi terhadap

pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan agar dapat hidup secara produktif dan sehat. Lebih jauh dijelaskan bahwa ketahanan pangan mencakup empat aspek, yaitu kecukupan (*sufficiency*), akses (*access*), keterjaminan (*security*), dan waktu (*time*).

Berdasarkan empat aspek ketahanan pangan tersebut, maka ketahanan pangan dipandang sebagai suatu system, yang mana system ketahanan pangan merupakan rangkaian dari tiga komponen utama, yaitu : 1) ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability and stability*), 2) kemudahan memperoleh bahan pangan (*food accessibility*), dan 3) pemanfaatan pangan (*food utilization*). Hal ini berarti bahwa faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah faktor yang juga berpengaruh terhadap ketiga komponen utama ketahanan pangan tersebut.

Komponen ketersediaan dan stabilitas pangan dipengaruhi oleh sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya sosial, serta produksi pangan baik *on farm* maupun *off farm*. Akses pangan menunjukkan jaminan bahwa setiap rumah tangga dan individu mempunyai sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan norma gizi. Kondisi tersebut tercermin dari kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan dan produksi pangan , yang mana dipengaruhi oleh harga pangan dan sumberdaya keluarga seperti tenaga kerja dan modal.

Pemanfaatan pangan mencerminkan kemampuan tubuh untuk mengolah pangan dan mengubahnya ke dalam bentuk energi yang dapat

digunakan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari atau disimpan. Dimensi pemanfaatan pangan, meliputi konsumsi pangan dan status gizi (Baliwati, 2001).

Maxwell dan Frankenberger (1992), mengatakan bahwa pencapaian ketahanan pangan dapat diukur dari berbagai indikator, dimana indikator tersebut dapat dikelompokkan dalam indikator proses dan indikator dampak. Indikator proses menggambarkan situasi pangan yang ditunjukkan oleh ketersediaan dan akses pangan, sedangkan indikator dampak meliputi indikator langsung dan tak langsung.

Indikator ketersediaan pangan berkaitan dengan produksi pertanian, iklim, akses terhadap sumberdaya alam, praktek pengelolaan lahan, pengembangan institusi, pasar, konflik regional dan kerusuhan sosial. Indikator akses pangan meliputi antara lain, sumber pendapatan, akses terhadap kredit modal, dan strategi rumah tangga untuk memenuhi kekurangan pangannya (*coping ability indicator*). Indikator dampak secara langsung adalah konsumsi dan frekuensi pangan, sedangkan indikator tak langsung meliputi status gizi dan penyimpanan pangan.

Menurut FAO (1997), bahwa ketahanan pangan adalah suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan mempunyai akses untuk memperolehnya, baik secara fisik maupun ekonomi. Dalam pengertian tersebut ketahanan pangan dikaitkan dengan tiga faktor utama yaitu : kecukupan (ketersediaan) pangan, stabilitas

ekonomi masyarakat, dan akses fisik dan ekonomi bagi individu untuk mendapatkan pangan.

Dewan Ketahanan Pangan (2001), mengkategorikan ketahanan pangan sebagai suatu sistem ekonomi pangan yang terdiri dari subsistem yang saling berinteraksi, yaitu subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi, ketiga subsistem tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dukungan input sumberdaya alam (lahan dan air) dan dukungan input lainnya seperti kelembagaan, budaya dan teknologi. Sementara itu, demi terwujudnya ketahanan pangan dalam suatu masyarakat, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dimana masyarakat diharapkan memberikan dukungan dan partisipasi nyata dari seluruh aspek yang terkait dengan semua subsistem ketahanan pangan.

Hasil yang diharapkan dari pembangunan sistem ketahanan pangan adalah terpenuhinya hak atas pangan (*food entitlement*) dan berkembangnya sumberdaya manusia yang berkualitas, serta meningkatnya ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional serta terciptanya manusia Indonesia yang sehat.

Konsep ketahanan pangan, kemudian berkembang menjadi dua konsep utama yaitu konsep swasembada (*self sufficiency*) yaitu suatu konsep yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik melalui produksi dalam negeri. Konsep tersebut menganggap bahwa suatu negara atau wilayah dianggap memiliki ketahanan pangan yang kuat jika

mampu memproduksi sendiri kebutuhan pangan masyarakatnya. Konsep ini sering dianggap sebagai konsep yang mengabaikan prinsip-prinsip efisiensi dan keunggulan komparatif (Sutrisno, 1998).

Konsep yang kedua adalah ketahanan pangan dalam artian *Economic Income*, yang menganggap bahwa ketahanan pangan yang baik tidak harus kebutuhan pangannya diproduksi sendiri, yang penting adalah mereka memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli bahan pangan yang ada di pasar baik lokal maupun internasional (Tabor, *et al.*, 1999).

Sehubungan dengan perkembangan pengertian ketahanan pangan tersebut di atas, maka kemudian dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 (Kantor Menteri Negara Urusan Pangan, 1996), dikatakan bahwa ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Dengan pengertian seperti itu, maka berbicara soal ketahanan pangan, pada dasarnya kita bicara soal berbagai hal yang dapat menyebabkan orang tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Berbagai hal yang dimaksud adalah tersedianya pangan, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat (Sukirman, 1996; FAO, 1996; Thomas, 1992). Ketiga faktor tersebut akan sangat menentukan apakah suatu rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi setiap anggota keluarganya atau tidak.

Banyak definisi tentang ketahanan pangan yang telah dikemukakan oleh para ahli maupun lembaga, namun secara sederhana dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan adalah suatu kondisi dimana semua masyarakat di wilayah tersebut dapat mengakses setiap saat baik secara fisik maupun ekonomis akan kebutuhan pangan pokok yang mereka butuhkan (Rosner, 2003). Dengan kata lain bahwa suatu daerah atau wilayah dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik, jika semua masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan pokok pangannya, baik secara kualitas maupun kuantitas setiap saat dia butuhkan.

Masalah ketahanan pangan suatu wilayah bukan hanya terkait dengan produksi bahan pangan yang dihasilkan oleh daerah tersebut, akan tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti distribusi pangan yang dilakukan, jenis mutu dan gizi yang layak dikonsumsi, masalah keamanan pangan, dan keterjangkauan dari segi harga. Faktor-faktor tersebut akan terkait satu sama lain, yang pada akhirnya akan menentukan status ketahanan pangan dari suatu wilayah.

Ada dua konsep ketahanan pangan yang berkembang saat ini, yaitu ketahanan pangan yang berdasarkan swasembada atau atas produksi sendiri, dan yang lain adalah ketahanan pangan yang diukur dari kemampuan suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya, yang dinilai dari tingkat pendapatan yang dimiliki, meskipun harus membeli bahan pangan dari pihak lain (Molenaux, 2003).

Untuk tercapainya sistem ketahanan pangan dari suatu masyarakat , yang berlangsung secara berkesinambungan dan merata bagi setiap masyarakat, maka pembangunan pertanian yang dikembangkan perlu memiliki beberapa kriteria, seperti sustainable (berkelanjutan), livelihood (untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk), dan equity (adil bagi semua masyarakat) (ISLE, 1998). Jika semua kriteria tersebut telah terpenuhi dan diwujudkan, maka diharapkan bahwa ketahanan pangan penduduk suatu Negara atau wilayah akan tercapai.

Dengan mengutip pendapat Webb and Rodgers (2003), Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia (2004), mengemukakan bahwa ketahanan pangan sangat tergantung pada tiga hal pokok, yaitu ketersediaan pangan yang mencakup sumberdaya alam yang dimiliki dan produktifitasnya; yang kedua adalah akses terhadap pangan yang terjamin yang meliputi produktifitas kerja dan penghasilan keluarga, dan yang ketiga adalah pemanfaatan pangan yang tepat, yang mencakup pola konsumsi pangan keluarga dan Nutrisi keluarga.

Lebih jauh dijelaskan bahwa ketersediaan pangan yang cukup akan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti sumberdaya alam yang berkesinambungan, asset produktif, tersediaya lapangan pekerjaan, produktifitas buruh, kestabilan dan keragaman pekerjaan. Akses pangan yang terjamin perlu didukung oleh dua hal yang penting, yaitu : 1) produktifitas yang meliputi produktifitas buruh, kestabilan dan keragaman pekerjaan; 2) pendapatan masyarakat yang meliputi integrasi pasar, daya

beli masyarakat, kemampuan menabung, akses kredit, dan pendidikan. Aspek Pemanfaatan bahan pangan yang tepat ditentukan oleh dua faktor utama yaitu masalah konsumsi dan nutrisi. Persoalan konsumsi adalah kesetaraan distribusi pangan dalam masyarakat atau keluarga, keragaman jenis pangan dan tingkat pendidikan khususnya kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Masalah nutrisi meliputi kesehatan dan sanitasi, perawatan ibu dan anak, pendidikan, keterampilan dan keahlian.

Resiko ketahanan pangan dapat menyebabkan terjadinya kerawanan pangan, dimana resiko ketahanan pangan dapat meliputi resiko sumberdaya alam, resiko pasar dan kondisi ekonomi lainnya, resiko sosial dan kesehatan serta resiko politik. Resiko sumberdaya alam meliputi gangguan iklim, eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, ketidakstabilan hasil, perusakan sumberdaya alam, dan pengabaian mitigasi bahaya kerusakan alam.

Resiko pasar dan kondisi ekonomi lainnya dapat berupa fluktuasi pendapatan, kelumpuhan perdagangan, ketidakmampuan menabung, ketidakstabilan harga, biaya transaksi yang tinggi, informasi yang tidak merata serta inflasi yang terjadi. Sedangkan resiko sosial dan kesehatan meliputi epidemi, HIV/AIDS, malnutrisi, korupsi, disintegrasi sosial, aksi militer, dan diskriminasi sosial (Dewan Ketahanan Pangan RI, 2004).

Indikator ketahanan pangan yang digunakan untuk menganalisis ketahanan pangan adalah indikator outcomes seperti yang direkomendasikan oleh FAO (2001), yang meliputi : Umur harapan hidup,

prevalensi anak kurang gizi, dan angka kematian bayi, sebagai gambaran dari bagaimana suatu masyarakat atau rumah tangga memanfaatkan pangan yang diproduksinya atau yang dapat diakses dari pasar. Sejalan dengan itu, (Bappenas, 2002) menambahkan bahwa untuk mengukur tingkat ketahanan pangan indikator lain yang bisa digunakan adalah angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan daya beli masyarakat.

Upaya untuk menganalisis aspek ketahanan pangan baik dalam rumah tangga maupun untuk suatu wilayah, maka diadakan kajian metode pendekatan di dalam mengukur ketahanan pangan dari aspek terkecil yaitu rumah tangga, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis ketahanan pangan suatu wilayah.

B. Ketahanan Pangan Masyarakat

Dalam Pembangunan Jangka Panjang II, sasaran dan kebijakan pangan diarahkan pada : (1) terwujudnya ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga atau masyarakat yang direfleksikan oleh ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang cukup tinggi; (2) terwujudnya diversifikasi pangan dalam bentuk ketersediaan berbagai komoditas pangan dan pangan olahan ; (3) terjaminnya keamanan pangan yang dicirikan oleh bebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya terhadap kesehatan dan tidak sesuai dengan keyakinan mereka; dan (4) perlunya dukungan aspek kelembagaan pangan dalam bentuk peningkatan pelayanan dan koordinasi penyediaan pangan ,

kebijaksanaan harga dan distribusi pangan, serta sistem pengembangan industri pangan.

Dalam GBHN Tahun 1999 – 2004, dua fokus kebijakan pembangunan pertanian adalah , pertama mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman sumberdaya bahan pangan, serta kelembagaan dan budaya lokal, dan kedua adalah mengembangkan agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetensi dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumberdaya manusia daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil rumusan Internasional Congress Of Nutrition (ICN) di Roma pada tahun 1992, ketahanan pangan rumah tangga didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dalam jumlah, mutu, dan ragam yang seimbang dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara produktif (Suharjo, 1996 : 3)

Ketahanan pangan dimasyarakat belum tentu menjamin tercapainya ketahanan pangan rumah tangga, hal ini disebabkan karena daya beli rumah tangga tidak mampu menjangkau pangan tersebut, atau rumah tangga tidak dapat mengakses pangan tersebut meskipun hal itu cukup tersedia di pasar. Oleh karena itu, maka ketahanan pangan rumah tangga lebih ditentukan oleh kemampuan rumah tangga untuk mengendalikan kebutuhan pangannya. Kemampuan pengendalian tersebut lebih

dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga dalam memproduksi sendiri bahan pangan dan kemampuan membeli pangan di pasar. Masyarakat berpendapatan rendah pada umumnya memperoleh pagannya bukan dengan memproduksi sendiri, melainkan membeli di pasar. Oleh karena itu, kemampuan membeli pangan inilah yang menjadi sumber ketahanan pangan rumah tangga, yang lebih tergantung pada daya beli rumah tangga (Pakpahan, dkk. 1990)

Menurut Susanto (1996: 6-7), bahwa ketahanan pangan rumah tangga maupun wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan dan kemampuan daya beli, akan tetapi juga oleh beberapa hal yang berkaitan dengan aspek sosial budaya. Dikatakan bahwa masalah-masalah sosial budaya yang terkait dengan ketahanan pangan meliputi: kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan yang sehat, sulitnya mempertahankan kebijakan swasembada pangan yang telah ditetapkan, tingkat konsumsi yang masih rendah (jumlah, mutu, ragam), tingkat pendidikan yang rendah, dan masalah yang berkaitan dengan distribusi pangan yang belum merata antar daerah dan rumah tangga yang saat ini masih berpusat di ibukota.

Ada dua jenis ketidaktahanan pangan suatu masyarakat, yang pertama adalah yang bersifat kronik (*chronic food insecurity*) dan yang kedua adalah yang bersifat sementara (*transitory food insecurity*). Yang pertama terjadi dan berlangsung secara terus menerus yang biasanya disebabkan oleh rendahnya daya beli atau kemampuan memproduksi

sendiri sehingga sering terjadi pada daerah yang terisolir dan gersang. Ketidak tahanan pangan jenis kedua (sementara) terjadi secara mendadak karena ketidakmantapan harga pangan dan produksi pangan atau pendapatan keluarga, sehingga pada suatu saat masyarakat tidak mempunyai cukup pangan untuk dikonsumsi (Gittinger, et al., 1997: 3-7 ; dan Hidayat, 1997 : 9)

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga, maka dapat ditempuh melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi distribusi pangan, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kemampuan penyediaan pangan, peningkatan pembentukan cadangan pangan, dan peningkatan pengetahuan pangan dan gizi (Suharjo, 1996: 7-8; Soetrisno, 1996: 6; Konandreas, 1991: 17-19).

Senada dengan pendapat tersebut, Frankenberger dan M.K. Mc Caston (1992:32), mengatakan bahwa keberlanjutan ketahanan pangan rumah tangga dapat dicapai melalui upaya-upaya : peningkatan produksi, adanya alternatif kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan, peningkatan kapasitas cadangan pangan, strategi ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan tingkat ketahanan pangan masyarakat atau rumah tangga, maka menurut Timmer dkk dalam (Thaha, 1995: 75-77) ada beberapa teori yang berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan pengeluaran untuk bahan pangan (makanan), antara lain :

1. Teori Consumer Choise

Teori ini mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang berpendapatan cukup akan menyediakan dana yang cukup dan seimbang untuk belanja pangan dan non pangan, akan tetapi pergeseran tersebut akan tetap berada pada batas-batas keseimbangan kebutuhan pangan dan non pangan. Akan tetapi pola ini tidak akan terjadi pada kelompok miskin.

2. Teori Budget Constrain

Teori ini mengatakan bahwa ketika menentukan biaya untuk belanja pangan dan non pangan, maka kelompok miskin akan diperhadapkan pada dua kendala, yaitu pertama, berapa total pendapatan yang akan dibelanjakan, dan kedua adalah harga relatif dari komoditi yang akan dibeli. Dengan pendapatan yang sangat terbatas, peningkatan pendapatan akan meningkatkan pula belanja untuk pangan. Akan tetapi sebaliknya terjadi bila pendapatan kelompok miskin menurun. Dengan demikian jumlah pangan yang dibeli akan menurun kuantitas dan kualitasnya.

3. Teori Elastisitas Permintaan Terhadap Makanan

Meningkatnya variasi makanan yang dibeli akan bersamaan dengan peningkatan pendapatan. Diet dengan karbohidrat tinggi dan protein rendah akan lebih bervariasi ketika pendapatan meningkatkan

daya beli untuk membeli buah, sayuran, dan sumber hewani yang lebih mahal. Perbedaan produk yang dibeli berdasarkan tingkat pendapatan dalam terminology ekonomi disebut sebagai elastisitas permintaan.

4. Teori Elastisitas Pendapatan Terhadap Makanan

Elastisitas pendapatan menunjukkan prosentase perubahan permintaan ketika pendapatan berubah sebesar 1 % (Thaha, 1995). Elastisitas pendapatan untuk sebagian besar bahan makanan adalah lebih besar dari nol. Artinya konsumsi meningkat bila pendapatan meningkat. Ada beberapa jenis makanan yang harus tetap dibeli walaupun pendapatan rendah, berarti bahwa permintaan makanan itu tidak elastis.

C. Karakteristik Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan

1. Masyarakat Perkotaan

Menurut Koestoer (1997), kota adalah sebuah sistem jaringan kehidupan manusia yang memiliki kecirian sosial seperti : jumlah penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen dengan corak yang materialistik. Kota memiliki kondisi fisik yang moderen, sarana dan prasarana yang lengkap, jaringan transportasi yang kompleks, serta sektor pelayanan dan industri yang dominan.

Suparlan (1996), mengemukakan bahwa kota didefinisikan sebagai sebuah tempat pemukiman yang dihuni secara permanen dan masyarakatnya membentuk sebuah kesatuan hidup yang lebih besar

pengelompokannya, sehingga di daerah perkotaan melahirkan sistem pembagian kerja yang jelas, munculnya kelas-kelas sosial yang mempunyai fungsi berbeda, serta melahirkan berbagai spesialisasi pekerjaan yang beragam.

Pengertian kota tidak dapat dilepaskan dari pengertian wilayah atau kawasan dimana penduduk yang menghuninya memperlihatkan karakteristik sosial sebagai berikut : (1) sifat heterogenitas sosial yang terjadi karena kepadatan penduduk, yang mendorong orang untuk saling bersaing dan memiliki keahlian yang paling sesuai dengan kepentingannya; (2) hubungan antar individu bersifat formal (sekunder) dimana interaksi antara anggota di dalam lembaga atau kelompok terbatas yang mempunyai persamaan kepentingan; (3) mobilitas sosial dalam hal ini perubahan sosial seseorang yang menginginkan kenaikan status dalam masyarakat yang tinggi sehingga segalanya menjadi profesional dan mendorong terjadinya spesifikasi dalam pekerjaan; (4) kontrol sosial tidak bersifat pribadi, karena dalam masyarakat kota tingkah laku pribadi tidak menjadi perhatian, sebaliknya yang ada adalah perilaku masyarakat dimana norma yang mengatur bersifat normatif tertulis; (5) individualisme anggota masyarakat, dimana setiap orang memutuskan sendiri kehendaknya tanpa tekanan atau desakan orang lain.

Mc Iver (1962) dalam Idris (1996) , mengatakan bahwa masyarakat kota berbeda dengan masyarakat desa dalam kenyataan karena: (1) kota terdiri atas banyak kelompok orang, tidak terikat dengan tanah

sehingga orang mempunyai masa depan yang berbeda; (2) kehidupan yang heterogen dalam berbagai bidang, dimana heterogenitas ini disebabkan oleh spesialisasi orang pada masing-masing pekerjaannya dalam kehidupan masyarakat kota.

Penduduk perkotaan memiliki pekerjaan yang lebih beragam dan menjurus kepada spesialisasi, jika dibandingkan dengan penduduk pedesaan yang lebih serba bisa tetapi bertumpu pada satu sektor, misalnya pertanian dan lain sebagainya (Susanto, 1993). Oleh karena itu, status sosial ekonomi masyarakat perkotaan yang banyak mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya adalah tingkat pendidikan dan keterampilannya, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan yang dimilikinya.

Hubungan antar manusia dalam masyarakat perkotaan menunjukkan hubungan yang bersifat sekunder, antara satu dengan yang lain terikat pada suatu organisasi atau asosiasi yang banyak jumlahnya, dimana seseorang dapat terlibat pada lebih dari satu asosiasi karena profesi atau karena persamaan kepentingan. Kontrol sosial dari masyarakat seperti yang terjadi dalam masyarakat pedesaan, tidak lagi dijumpai, tetapi yang ada adalah kontrol sosial dari keluarga (Susanto, 1989). Lebih jauh dijelaskan bahwa setiap individu berkesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan prestasi dimana status sosial dapat diperoleh dengan keterampilan dan spesialisasi.

Evers (1995), mengemukakan bahwa ciri masyarakat perkotaan adalah impersonal, rasional, formal, segmental dan didasari oleh kepentingan dan tujuan. Sementara itu, pola interaksi sosial pada masyarakat perkotaan diwarnai oleh kontak sosial dan komunikasi yang tinggi, kerjasama antar masyarakat yang intensif, terjadinya kompetisi dan kontroversi, akomodasi dan konflik yang lebih sering terjadi.

2. Masyarakat Pedesaan

Dalam masyarakat moderen, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan (*rural community dan urban community*) meskipun demikian tidak mudah untuk membedakannya secara tegas, karena antara desa dan kota akan mempunyai kaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi dan tergantung. Sebagian orang menganggap bahwa perkotaan berbeda dengan pedesaan karena kepadatan penduduknya yang lebih tinggi, akan tetapi batasan tersebut tidak seluruhnya benar karena banyak juga desa yang berpenduduk padat.

Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dibandingkan dengan perkotaan, dimana sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk daerah pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian sebagai pekerjaan utama, meskipun disertai dengan pekerjaan sampingan seperti : tukang kayu, tukang genteng dan bata, dan pekerjaan lainnya. Pekerjaan

sambilan tersebut biasanya akan ditinggalkan apabila musim tanam atau musim panen tiba (Sukanto, 1990)

Menurut Sajogyo (1985), bahwa salah satu ciri dari masyarakat pedesaan adalah bahwa kegiatan usahanya masih sangat berpedoman kepada kebutuhannya sendiri, artinya apa yang diusahakan adalah tergantung kepada apa yang mereka butuhkan. Masyarakat pedesaan akan berproduksi pertama tama untuk kepentingan hidup sendiri, dan hanya sebagian kecil yang disisihkan. Mereka tidak berproduksi untuk pasaran, dengan mengejar keuntungan yang dapat diperolehnya.

Ciri-ciri relasi sosial yang ada di desa adalah bahwa hubungan kekerabatan, sistem kekerabatan dan kelompok kekerabatan masih memegang peranan penting. Meskipun demikian masyarakat pedesaan mempunyai struktur hirarki yang lebih tegas, sehingga memiliki stratifikasi sosial yang lebih jelas.

Supriyanto (2000), mengemukakan bahwa sebagian besar tingkat kehidupan masyarakat pedesaan adalah berada dalam taraf kemiskinan, dimana ada lima karakteristik kemiskinan, sebagai berikut :

- (1) penduduk miskin tidak memiliki faktor-faktor produksi sendiri,
- (2) tidak memungkinkan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri;
- (3) tingkat pendidikan dari penduduknya pada umumnya sangat rendah;
- (4) sebagian mereka tidak memiliki fasilitas;
- dan (5) kebanyakan penduduknya berusia muda dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai.

Dalam rangka mengatasi kemiskinan penduduk pedesaan, maka salah satu konsep yang dikemukakan oleh Bannet dalam (Ahimsa, 1985) , yang dikenal sebagai konsep household strategi adalah pola-pola yang dibentuk oleh berbagai penyesuaian yang direncanakan oleh manusia untuk mendapatkan serta memanfaatkan sumberdaya demi untuk memecahkan masalah yang langsung mereka hadapi. Rafiy (1997), mengemukakan bahwa strategi rumah tangga itu sebagai pola-pola yang dibentuk oleh berbagai usaha yang direncanakan oleh manusia untuk memenuhi syarat minimal yang dibutuhkannya demi memecahkan masalah yang dihadapi.

Menurut Clark (1986) dalam Rafiy (1997), bahwa strategi pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, dapat dilakukan selain menekan seminimal mungkin pengeluaran rumah tangga, maka mereka juga dapat membentuk jaringan sosial sesama dan memberi kesempatan kepada seluruh anggota keluarga untuk mencari nafkah.

Lebih jauh dijelaskan bahwa salah satu kekuatan sosial yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, adalah pemanfaatan waktu luang untuk bekerja demi menambah penghasilan keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan dasar utamanya pangan.

Susanto (1984) dengan mengutip pendapat James C. Scott, mengemukakan bahwa ada tiga cara yang bisa dilakukan masyarakat miskin dipedesaan untuk mengatasi masalah kekurangan bahan pangan dan kebutuhan lainnya, yaitu : (1) melakukan penghematan

pengeluaran dengan cara mengurangi frekwensi makan dan mutu bahan makanan; (2) menganekaragamkan sumber pendapatan dengan berbagai bidang usaha seperti berjualan, menjadi tukang, buruh lepas dan bermigrasi; (3) memanfaatkan hubungan patron-client untuk mendapatkan jaminan dari pemilik lahan.

Dari hasil pengamatan Effendi (1993), mengungkapkan bahwa sebagian penduduk miskin di pedesaan selalu berusaha memperbaiki nasib mereka dari tahun ke tahun dengan cara berpindah dari satu pekerjaan kepada pekerjaan lainnya, dan dikemukakan pula bahwa sebagian besar dari mereka mampu menciptakan lapangan kerja dan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

D. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat

Keluarga atau rumah tangga dapat dipandang sebagai bagian terkecil dari suatu masyarakat, yang menggambarkan suatu kesatuan keanggotaannya melalui suatu perkawinan dan hubungan darah. Keluarga dapat dipandang atau diperlakukan sebagai suatu sistem sosial dalam masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam masyarakat dikenal istilah keluarga inti, keluarga prokreasi dan keluarga orientasi yang masing-masing terdiri dari dua generasi, serta keluarga luas yang terdiri dari tiga generasi (Levy, 1971, dalam Bulkis, 2004)

Dalam konteks masyarakat dengan sistem pertanian yang agraris, keluarga dan rumah tangga merupakan unit produksi, konsumsi dan

reproduksi serta interaksi sosial ekonomi. Oleh karena itu, kita tidak cukup hanya memperhatikan bentuk dan fungsi dari rumah tangga saja, melainkan perlu mengerti mengenai perilaku dan terbentuknya rumah tangga itu. Misalnya dalam model baru ekonomi rumah tangga (*The new household economic*) yang dikembangkan berdasarkan atas kesatuan rumah tangga terdiri dari keluarga inti yang merupakan dasar utama dari terbentuknya keluarga lainnya (Sajogyo, 1982).

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari suatu masyarakat, maka anggota-anggota keluarga dituntut untuk melakukan peranannya masing-masing sesuai dengan statusnya. Misalnya suami sebagai kepala keluarga dituntut melakukan perannya sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, sementara istri dituntut untuk menjalankan perannya sebagai pendidik utama anak-anak.

Beberapa strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dalam suatu masyarakat adalah berkaitan dengan kebijakan pembangunan meliputi kebijakan ekonomi makro, pembangunan pangan atau pertanian dan pedesaan, peningkatan akses terhadap lahan berupa pemberian kredit untuk rumah tangga miskin, peningkatan kesempatan kerja dan usaha, subsidi dan bantuan pangan, dan penguatan mekanisme adaptasi rumah tangga dalam kondisi darurat. Berbagai kebijakan tersebut merupakan aplikasi dari aturan permainan yang dirumuskan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah bertanggungjawab dalam memberikan

dukungan, bantuan, lingkungan yang kondusif dan penyusunan sasaran dan tujuan jangka panjang (FAO, 1998).

Menurut Sutrisno (1996), bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga maka diperlukan adanya kelembagaan pangan yang kuat, karena ketahanan pangan menyangkut cakupan luas dan bersifat multi sektoral. Kelembagaan pangan meliputi aspek peraturan perundangan, organisasi sebagai pelaksana peraturan perundangan dan ketatalaksanaan.

Dalam hubungannya dengan status dan peranan anggota keluarga dan rumah tangga dari suatu masyarakat, teori analisis struktur dan fungsional (Levy, 1971, dalam Bulkis, 2004), berasumsi bahwa mantapnya keluarga sebagai sistem sosial dapat dianalisa dengan kelima fungsi yang saling berkaitan, walaupun masing-masing memiliki fungsi otonomi, yaitu : diferensiasi peranan, alokasi ekonomi, alokasi kekuasaan, alokasi solidaritas, dan alokasi integrasi dan ekspresi. Dalam kaitannya dengan alokasi ekonomi, dalam suatu sistem keluarga diperlukan mengingat konsumsi anggota-anggotanya akan barang dan jasa (pangan, pakaian, perumahan dan sebagainya) yang harus diperoleh karena usaha produksi dari anggota-anggotanya pula. Sehingga akan kelihatan siapa yang ikut serta dalam mendatangkan pendapatan.

Mengenai sumber penghasilan dari usaha produktif, lebih jauh dijelaskan pentingnya membedakan apakah karena usaha seseorang (petani, pengusaha kerajinan rumah tangga) atau beberapa anggota

rumah tangga yang bergabung dalam kesatuan produktif di luar keluarga. Kemudian yang lain adalah apakah hasil produktif yang diperoleh dari usaha produktif milik keluarga tersebut.

Keterlibatan anggota keluarga dalam menunjang ekonomi rumah tangga pada berbagai tipe ekosistem berbeda satu sama lain, sangat tergantung pada kesetaraan setiap anggota keluarga dari tipe ekosistem tersebut (Bulkis, 2004). Selanjutnya dikemukakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat ketahanan pangan antar berbagai tipe ekosistem dalam penelitian tersebut adalah motivasi kerja dari setiap anggota keluarga yang mana lebih banyak ditentukan oleh kesempatan kerja yang tersedia pada masing-masing tipe ekosistem tersebut, misalnya pada ekosistem sawah memiliki peluang kerja yang lebih besar dari ekosistem lahan kering dan pulau-pulau kecil.

Dari gambaran di atas maka dapat ditarik suatu pernyataan bahwa antar berbagai sistem sosial masyarakat yang berbeda, akan memiliki pula perbedaan setiap anggota masyarakatnya dalam hal bagaimana strategi mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi khususnya kebutuhan pangan keluarganya, misalnya pada masyarakat pedesaan yang identik dengan pertanian akan berbeda dengan masyarakat perkotaan yang non pertanian.

E. Konsumsi Pangan Masyarakat

Konsumsi pangan dapat diartikan sebagai jumlah pangan baik tunggal maupun beragam, yang dimakan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan biologis, dimana konsumsi pangan tersebut mempunyai tiga tujuan utama, yaitu : 1) tujuan fisiologis untuk mengatasi rasa lapar atau keinginan memperoleh zat gizi yang dibutuhkan tubuh; 2) tujuan psikologis dimana pangan merupakan zat yang berhubungan dengan kebutuhan untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera seseorang; dan 3) tujuan sosiologis yang berhubungan dengan upaya memelihara hubungan antar manusia dalam kelompok kecil (keluarga) maupun kelompok yang lebih besar seperti masyarakat (Khomsan, 1997).

Senada dengan pendapat tersebut, (Sanjur, 1982), mengemukakan bahwa konsumsi pangan mengacu pada pengertian jumlah pangan yang tersedia, dan dapat dikonsumsi oleh individu, keluarga ataupun masyarakat. Dengan demikian, maka konsumsi pangan meliputi terpenuhinya kebutuhan individu atau masyarakat akan zat gizi, keaneka ragaman dan kewaspadaan.

Jika dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, maka masyarakat perkotaan umumnya memiliki tingkat konsumsi pangan yang lebih baik, karena umumnya mereka mempunyai tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih baik, serta variasi makanan dan minuman di kota lebih tersedia, mudah diperoleh baik di pasar maupun superkarket (Aini, dkk., 2004).

Pola konsumsi pangan merupakan produk budaya, dimana merupakan kesanggupan seseorang atau masyarakat untuk menyusun hidangan, adalah merupakan kepandaian yang diajarkan secara turun temurun dari leluhur melalui orang tua, sampai pada generasi sekarang (Suharjo, 1989).

Harper, dkk. (1986), mengartikan pola konsumsi pangan sebagai cara seseorang atau masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi pangan sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis dan sosial budaya, yang biasa juga disebut sebagai pola pangan atau kebiasaan makan.

Pola konsumsi pangan bagi masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa beras dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sebagai pangan pokok, dan hanya sebagian kecil yang mengkonsumsi sereal lain dan umbi-umbian sebagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari (Ridwan, dkk. 1989).

Salah satu konsep yang berkaitan erat dengan masalah pola konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern*, disusun dengan maksud untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, meliputi kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai citarasa. Pendekatan ini mengarah pada perencanaan dan penyediaan konsumsi pangan masyarakat sehingga diharapkan memenuhi kecukupan gizi (*nutritional adequacy*), keseimbangan gizi (*nutritional balance*), yang didukung

oleh citarasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas serta kemampuan daya beli (*affordability*). Lebih jauh dikatakan bahwa Pola Pangan Harapan merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi atau kelompok pangan dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan (Suhardjo, 1989).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola konsumsi pangan seseorang atau suatu masyarakat, diantaranya kebudayaan (Harper, dkk. 1989), status ekonomi, pengetahuan gizi seperti memilih, menyimpan, memperoleh dan mengolah makanan yang baik murah dan bergizi (Khomsan, 1996). Sedangkan menurut Sediaoetama (2000), bahwa semakin banyak pengetahuan gizinya, maka semakin diperhitungkan jenis dan kuantum makanan yang dikonsumsi, bukan pemilihan makanan berdasarkan yang menarik panca indera, tetapi berdasarkan pertimbangan rasional dan pengetahuan gizi.

Ada lima macam zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Tiga diantaranya merupakan sumber energi bagi tubuh, yaitu karbohidrat, lemak dan protein, sehingga mampu mempertahankan kerja alat-alat tubuh dan melakukan kegiatan fisik. Ketidakcukupan konsumsi energi dan protein erat kaitannya dengan kemiskinan, dimana sebagian besar masyarakat yang kekurangan konsumsi energi dan protein adalah penduduk miskin, yang jumlahnya masih cukup besar, (Sutomo, 1988).

Konsumsi pangan akan mempengaruhi status gizi, yang diartikan sebagai hasil interaksi antara asupan zat-zat gizi dengan individu yang mengkonsumsinya dan faktor lingkungannya, sehingga erat kaitannya dengan tingkat konsumsi pangan dari individu yang bersangkutan. Faktor yang berpengaruh terhadap status gizi adalah asupan gizi, penyakit infeksi, ketahanan pangan rumah tangga, pola pengasuhan anak, dan pelayanan kesehatan lingkungannya (Azwar, A. 2004)

Menurut Atmarita (2004) bahwa secara umum ada dua metode pengukuran atau pemeriksaan kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung meliputi 1) cara antropometri yang mengamati misalnya BB/umur untuk melihat status gizi akut atau kronis, mengamati kelebihan atau kekurangan berat badan pada anak balita, mengamati tinggi badan/umur untuk mengetahui status gizi seseorang dimasa lalu, pengamatan berat badan/tinggi badan anak balita sehingga dapat ditentukan kondisi gemuk, normal atau kurus. 2) cara biokimia dengan mengamati kandungan darah, urine, tinja, hati dan otot. 3) cara klinis mengamati perubahan-perubahan yang terjadi sehubungan dengan ketidakcukupan zat gizi yang dapat dilihat pada kulit, mata dan kelenjar tiroid, 4) cara biofisik yang mengamati perubahan struktur pada jaringan otot.

Pengukuran secara tidak langsung antara lain meliputi 1) statistik visual, misalnya dengan melihat angka kematian dan angka kesakitan berdasarkan kelompok umur dalam suatu masyarakat, 2) pengamatan

pengaruh faktor ekologi, yang biasa diamati pada penerapan program intervensi untuk melihat penyebab adanya gejala malnutrisi dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan tingkat konsumsi pangan dan zat gizi. Metode ini mengamati tingkat konsumsi zat gizi utama pada masyarakat seperti karbohidrat, protein dan lemak sebagai sumber energi yang akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya.

Menyangkut tentang pola konsumsi khususnya anak balita, tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah asupan gizi yang dikonsumsi, tetapi juga ditentukan oleh cara penyajian zat-zat gizi tersebut oleh orang tuanya, karena daya serap dan daya cerna zat gizi pada anak balita berbeda dengan orang dewasa.

Menurut Supariasa (2005) bahwa ada beberapa hal yang terkait dengan konsumsi pangan pada anak, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Beberapa faktor langsung yang sangat berperan adalah pola pengasuhan oleh ibunya, pola konsumsi dan cara pemberian makan dan penyakit infeksi yang diderita. Pola pengasuhan oleh orang tuanya akan berkaitan dengan munculnya gizi kurang akibat tidak seimbangnya konsumsi pangan dengan berat badan, demikian pula dengan cara pemberian makanan dan bentuk makanan yang dikonsumsi.

Pemberian makanan pada bayi dan anak balita harus dilakukan secara hati-hati dan memiliki aturan tersendiri, dimana pada saat berumur antara 0 – 6 bulan sebaiknya diberikan ASI (air susu ibu) eksklusif tanpa tambahan makanan lain. Pada usia 6 sampai 9 bulan air susu ibu sudah

harus diberi makanan pendamping (MP-ASI) berupa makanan lumat ketika bermur 9 sampai 12 bulan, air susu ibu harus didampingi dengan makanan lembek seperti bubur tim, dan pada usia 12 – 24 bulan sudah boleh mengkonsumsi makanan keluarga tetapi masih sebaiknya diberi ASI. Seorang anak sudah boleh mengkonsumsi makanan seperti orang dewasa jika telah berumur lebih dari 24 bulan dan tidak perlu lagi diberi air susu ibu (Suhardjo, 1999).

F. Penelitian Sejenis Sebelumnya

Untuk menghindari terjadi replikasi atau pengulangan masalah penelitian, maka sebelum peneliti menyusun rencana penelitian maka salah satu hal yang penting untuk mendapat perhatian adalah kajian mengenai hasil-hasil penelitian sejenis sebelumnya, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar dan perbandingan dalam memberikan bahasan mengenai hasil penelitian yang dilaksanakan.

Beberapa penelitian sejenis yang menjadi perhatian peneliti dalam hal ini adalah seperti digambarkan berikut ini :

Penelitian dengan judul " Analisis Ketahanan Pangan Regional dan Tingkat Rumah Tangga (Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Utara)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara regional status ketahanan pangan wilayah tergolong tahan pangan (dengan pendekatan tingkat ketersediaan pangan wilayah dibandingkan dengan norma kecukupan energi, NKE), sedangkan ditingkat rumah tangga masih ditemukan banyak rumah

tangga yang tergolong rawan pangan yaitu sekitar 20,8 %, dan kerawanan pangan pada daerah pedesaan lebih tinggi dari daerah perkotaan. oleh karena itu, maka arah kebijakan disarankan untuk meningkatkan derajat ketahanan pangan kepada rumah tangga pedesaan (Bastuti, Tri, dkk., 1999).

Sebuah penelitian berjudul "Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Pulau Lombok" (studi Kasus di Sukaraja Lombok Timur, Montong Sapah Lombok Tengan dah Ampena Mataran) yang ditulis oleh Hastuti, S. dkk. (2004), menemukan bahwa proporsi pengeluaran pangan penduduk berpendapatan rendah masih relatif tinggi yakni lebih dari 80 %, dimana proporsi terbesar digunakan untuk pengeluaran biji-bijian yang mencapai 46-57 % dari total pengeluaran pangan. Lebih jauh dijelaskan bahwa akibat adanya krisis ekonomi maka terjadi peningkatan rumah tangga yang mengalami rawan pangan, hal ini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Pabittei, M. (2005), dalam penelitian berjudul " Kebiasaan Makan dan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar di Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kabupaten Jeneponto dan Tana Toraja), mengemukakan bahwa prestasi belajar anak SD di Kabupaten Jeneponto dan Tana Toraja masih rendah disebabkan masih rendahnya tingkat konsumsi energi, protein, zat besi serta masih rendahnya tingkat pendidikan orang tuanya. Pengaruh faktor sosial budaya seperti tingkat pendidikan orang tua dan pengetahuan gizi

ibu terhadap kebiasaan makan keluarga menunjukkan bahwa di Jeneponto faktor tersebut berpengaruh, sedangkan di Tana Toraja tidak berpengaruh. Temuan lain menunjukkan bahwa kaitan antara kebiasaan makan dan status gizi tidak bermakna baik di Jeneponto maupun Tana Toraja.

Bulkis, S. (2004), dalam penelitian berjudul "Ketahanan Pangan Rumah Tangga (Suatu Kajian Sosiologis pada Tiga Tipe Agroekosistem di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan)", menunjukkan bahwa rumah tangga pada tipe agroekosistem sawah mempunyai tingkat ketahanan pangan yang lebih tinggi jika dibandingkan rumah tangga pada tipe agroekosistem lahan kering sebagai akibat dari adanya perbedaan pada tingkat pendapatan, daya beli pangan, ketersediaan pangan dan distribusi pangan pada tingkat wilayah.

Beberapa variabel determinan yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga pada ketiga tipe ekosistem tersebut adalah ketersediaan pangan, pendapatan, motivasi kerja dan konsumsi, peran dalam pengambilan keputusan, pengetahuan pangan dan gizi, norma-norma pangan dan tingkat penerapan teknologi.

Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa dari berbagai fungsi-fungsi yang ada (fungsi adaptasi, fungsi latensi, fungsi pencapaian tujuan, dan fungsi integrasi), maka fungsi adaptasi merupakan fungsi dominan mempengaruhi ketahanan pangan, sementara fungsi-fungsi lain hanya sebagai faktor pendukung.

Lamba, S.E. (2007), dengan penelitian berjudul " Kajian Ketahanan Pangan , Konsumsi Energi dan Protein Rumah tangga (Studi Kasus Rumah Tangga Petani Jagung di Desa Rumbia Kabupaten Jeneponto dan Desa Kaloling Kabupaten Bantaeng)", dimana penelitian ini mengkaji ketahanan pangan rumah tangga dengan menggunakan indeks ketahanan pangan seperti yang dikemukakan oleh Webb and Rodgers (2003). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga petani jagung di kabupaten Bantaeng lebih baik (kategori tahan pangan dengan indeks 0,17) dibandingkan dengan ketahanan pangan rumah tangga petani jagung di kabupaten Jeneponto yang tergolong cukup tahan dengan indeks 0,47.

Lebih jauh ditemukan bahwa tingkat konsumsi energi dan protein rumah tangga petani jagung pada kedua daerah tersebut telah melebihi standar pola pangan harapan yang ditetapkan, namun bahan pangan yang dikonsumsi belum beragam dan berimbang.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Ada dua faktor utama yang akan mempengaruhi karakteristik masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, yaitu faktor lingkungan atau ekosistem yang meliputi : iklim, tanah atau lahan dan tanaman. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor sosial berupa : teknologi, tingkat pendidikan dan organisasi sosial yang ada. Berdasarkan kedua

hal tersebut, maka masyarakat pedesaan akan berbeda dengan masyarakat perkotaan.

Ciri dari masyarakat pedesaan adalah sebagian besar dari masyarakat atau keluarga, bekerja atau sumber penghasilan utama keluarganya berasal dari sektor pertanian. Dengan demikian, maka kebutuhan pangan mereka biasanya adalah terpenuhi dari hasil produksi sendiri. Oleh karena itu, maka penghasilan utama mereka berasal dari pekerjaan sebagai petani, sementara penghasilan tambahan mungkin berasal dari bidang pekerjaan yang lain sebagai penunjang.

Adapun faktor-faktor yang akan menjadi parameter yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan masyarakat pedesaan antara lain: luas lahan, produksi pangan utamanya padi, total penghasilan dan tingkat pendidikan.

Sementara itu, masyarakat perkotaan akan lebih banyak bekerja pada sektor industri, sektor jasa dan sektor lain yang tidak berkaitan dengan sektor pertanian. Sehingga sumber pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya juga bukan atas produksi sendiri, akan tetapi dibeli dari pasar yang tersedia di kota. Dengan demikian maka faktor-faktor yang menjadi parameter penentu tingkat ketahanan pangan masyarakat perkotaan juga berbeda dengan masyarakat pedesaan, antara lain : Tingkat pendapatan total, pekerjaan utama, tingkat pendidikan dan luas lahan.

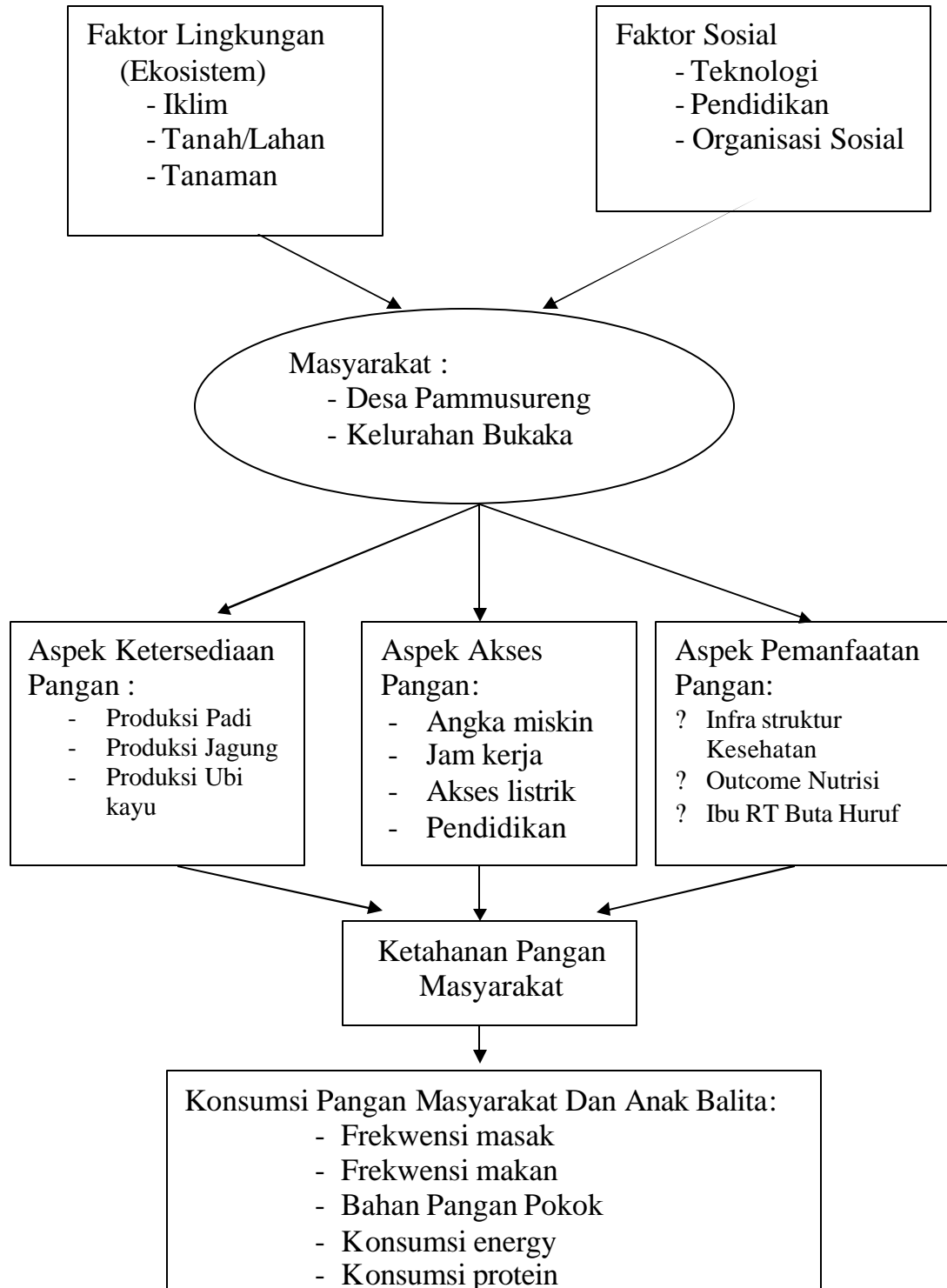
Faktor-faktor tersebut di atas selanjutnya akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan masyarakat, akses terhadap bahan pangan, dan pemanfaatan bahan pangan, yang ketiganya merupakan komponen dari ketahanan pangan masyarakat, seperti digambarkan dalam bagan kerangka pikir di bawah ini.

Beberapa indikator dari ketersediaan pangan antara lain adalah produksi bahan pangan seperti padi, jagung dan umbi-umbian, sementara itu akses bahan pangan dapat dilihat dari angka kemiskinan, jumlah jam kerja kepala rumah tangga, tingkat pendidikan dan akses terhadap listrik.

Pemanfaatan pangan rumah tangga dapat diamati dari infrastruktur kesehatan, outcome nutrisi rumah tangga, dan persentase ibu rumah tangga yang buta huruf. Ketiga aspek tersebut selanjutnya akan menentukan tingkat ketahanan pangan masyarakat baik pada daerah pedesaan maupun perkotaan.

Tingkat ketahanan pangan masyarakat akan berkaitan dengan pola konsumsi dan status gizi masyarakat utamanya anak balita, yang dapat dilihat dari frekwensi memasak, frekwensi makan, bahan pangan utama yang dikonsumsi, jumlah konsumsi protein dan energi rumah tangga.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian Mengenai Ketahanan Pangan dan Konsumsi Pangan Masyarakat



H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan kajian pustaka seperti telah dikemukakan di atas, maka dapat disusun suatu hipotesis sebagai berikut

1. Tingkat ketahanan pangan wilayah di Kelurahan Bukaka yang berada pada wilayah perkotaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Desa Pammusureng yang berada pada wilayah pedesaan.
2. Tingkat ketahanan pangan wilayah memiliki hubungan yang erat dengan tingkat konsumsi pangan masyarakat baik di Desa Pammusureng maupun Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone.